Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	8

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Pekalongan

Halaman 21

Rp6 M Diberikan Jelang Lebaran

Dana Harlindung untuk GTT dan PTT

PEKALONGAN - Hingga Mei bantuan dana penghargaan dan perlindungan (Harlindung) untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kota Pekalongan, belum bisa dicairkan.

Namun, Kepala Dinas Pendidikan, Soeroso, kemarin menjanjikan dana itu bisa dicairkan menjelang Lebaran dan dikirim melalui rekening para guru. ''Kami akan memberikan 8 Juni 2018, sepekan menjelang Lebaran untuk 2006 GTT dan PTT sebesar Rp 6 miliar. Karena itu, mohon kepada BKD untuk bisa memproses pencairan,'' kata Soeroso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD di ruang sidang, kemarin.

Rapat itu dipimpin Ketua Komisi C Sujaka Martana dengan koordinator Ismet Inonu. Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Dindik, Ayu Nawangwulan, Kabid PTk Dindik, Mabruri, Adam Muhamad (Kasubab Bagian Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum), dan Srimoyo Nurhayati dari Badan Keuangan Daerah (BKD).

Menurut Soeroso, dana Harlindung itu diberikan kepada GTT dan PTT mulai PAUD, TK, SD/MI, hingga SMP/MTs. Besar bantuan itu Rp 500.000 - Rp 1 juta per bulan. Biasanya April sudah diberikan, namun sampai kini belum diberikan, karena Perda Pendidikan yang diajukan ke provinsi masih dievaluasi, karena tidak ada dasar hukumnya. Perwal yang dijadikan dasar Harlindung selama ini perlu diperbaiki.

Karena itu, Dindik kini membuat draf Perwal yang baru sekaligus juknis untuk bisa mencairkan dana Harlindung. Dasarnya adalah dari PP 19 Tahun 2017 tentang Guru.

''Kita upayakan 8 Juni 2018 dana bisa diberikan untuk enam bulan mulai Januari hingga Juni 2018,'' katanya.

Tidak Dipotong

Kabid PTK, Dindik, Mabruri menambahkan, penerimaan Harlindung nanti tidak akan dipotong untuk pajak, namun dipotong untuk diikutkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp 36.500/-bulan. Sementara sebelumnya pemotongan pajak Rp 30.000. ''Selisihnya hanya Rp 6.500,'' katanya.

Srimoyo Nurhayati dari BKD mengharapkan proses aadministrasi segera diselesaikan secepatnya, sehingga pencairan dana Harlindung diharapkan bisa lebih cepat dari yang direncanakan. Sebab, saat mendekati Lebaran, biasanya Bank Jateng padat.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab yang dihubungi terpisah menegaskan, sudah seharusnya dana Harlindung diberikan sebelum Lebaran. ''Kasihan, dana Harlindung yang mestinya diberikan tiap bulan, sampai kini belum diberikan. Padahal, sekarang sudah mendekati Learan. Karena itu, pencairan dana tersebut jangan molor lagi,'' katanya.

Dia menegaskan, dalam kaitan Harlindung, DPRD bersama eksekutif sudah konsultasi ke Kemdikbud dan menyatakan dana itu bisa dicairkan.

''Kalau daerah tetangga Batang berani mencairkan, kenapa kita tidak berani,'' ungkap Balgis. (A15-27)